



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULKIPLI
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 676784

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	800.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 123 m2/60 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	42.000.000
1. MOTOR, HONDA NF 12A1CF MT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 28D MIO/AL115 S AT Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, HONDA D1A02N19M1 AT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOTOR, HONDA L1F02N37L1 A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	167.750.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	121.746.285
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.131.496.285
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.131.496.285

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.